



පිටි විලාස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
 දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS PERTANIAN

රජයේ සේවයේ පාලන කාර්යාලය, සිංගසන, ටබනන් කඹුණ
 JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937
 Website: <http://distan.tabanankab.go.id/> dan Email: distantbn@gmail.com
 Sanggulan - Tabanan

Singasana, 30 Januari 2025

Kepada
 Yth. Bupati Tabanan
 di_Singasana

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 045/ 1042 / Sekret/ Distan

NO	MACAM YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten Tabanan
I MADE SUBAGIA, S.Pi, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 196603081989031012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabanan, sebagai laporan ;
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERTANIAN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan ini memuat kegiatan yang telah kami lakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2024. Laporan ini sangatlah penting untuk mengetahui capaian kegiatan, kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam- dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

Kami menyadari LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan.



Tabanan, 9 Januari 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

I Made Subagia, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sistematisa Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.2 Program, Kegiatan dan penetapan Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	17
3.1 Akuntabilitas Kinerja	17
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja	23
3.4 Telaah Laporan Kinerja Kementerian pertanian Republik Indonesia Tahun 2023	41
3.5 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lain (Badung) Tahun 2023	43
3.6 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2023	45
3.7 Capaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2024	47
3.8 Prestasi Tahun 2024	50
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51

Lampiran

- Surat Keputusan Lakip Tahun 2024
- Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan
- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama	12
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2024	14
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024	21
Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan	23
Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai	24
Tabel 3.4 Produksi Komoditas Perkebunan	25
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan	26
Tabel 3.6 Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan	28
Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas Perkebunan	29
Tabel 3.8 Data Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	31
Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2024	32
Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2022	33
Tabel 3.11 Hasil Vaksinasi Sapi	34
Tabel 3.12 Hasil Vaksinasi Babi	34
Tabel 3.13 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2024 Kabupaten Tabanan	35
Tabel 3.14 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan	38
Tabel 3.15 Capaian Program dan Kegiatan Sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2024	45
	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan	24
Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya mengembangkan sektor pertanian dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif kelompok tani. Pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk dan bukan lagi pengembangan komoditas serta lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing. Permasalahan yang sering timbul antara lain penguasaan data informasi di lapangan, kelembagaan sumber daya manusia, sarana alat dan mesin pengolahan dan penguasaan teknologi pengendalian mutu hasil.

Pengembangan serta strategi pertanian kedepan adalah pengembangan yang diarahkan bagi terwujudnya sentra- sentra produksi dan terintegrasi dengan industry ikutannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan mulai dari hulu hingga ke hilir seperti: perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan peralatan dan mesin, pengolahan, modal kerja, pelatihan kerjasama kemitraan, pengendalian dan pendampingan secara berkelanjutan.

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab,serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek input, output tapi juga sampai pada outcome, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian Kabupaten Tabanan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggungjawab /kewenangan OPD, maka setiap tahun setiap opd wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan bermanfaat bagi

peningkatan pencapaian kinerja. LKjIP mencerminkan kinerja PD bersangkutan selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai tugas adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis

Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana,
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
 - Monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja

dinas pertanian;

- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan

ketertiban kantor;

- Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

.4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;

- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - Penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - Pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - Penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;

- Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan selama Tahun 2024 capaian kinerja (*performance result*) tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja untuk Tahun 2024.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa medatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian beserta indikatornya untuk masing-masing Misi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama

MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Misi III)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1 Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secarasosial – ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunandan Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian

kebudayaan (Madani)	Meningkatkan Prasaranadan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan sarana Pertanian
	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pertanian serta RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%

2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	98%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	55%

Sumber: Renstra Dinas Pertanian

2.2 Program, Kegiatan, dan Penetapan Kinerja Tahun 2024

Di tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengelola 14 kegiatan dan 31 subkegiatan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam dibawah.

Dari dana yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 serta rencana target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menetapkan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2024.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	DINAS PERTANIAN				39.639.485.956,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				39.639.485.956,00	
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			39.639.485.956,00	

3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	31.485.650.893,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	29.003.977.693,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	293.078.800,00	Pajak Air Permukaan
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	499.908.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1.538.793.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	144.892.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	2.325.768.759,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.206.295.690,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	170.103.594,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan benih/bibit	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	949.369.475,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	4.410.096.579,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	875.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	3.534.596.579,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	802.241.875,00	
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	761.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan vertiliner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 persen	40.516.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 persen	615.727.850,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 %	615.727.850,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
TOTAL								39.639.485.956,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut, sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang salingberkaitan antara satu sama lainnya.

Dalam upaya mewujudkan misi ke-3 bupati terpilih, setelah DPA disahkan Dinas Pertanian menyusun penetapan kinerja, sasaran strategis dan realisasi pada akhir tahun. Untuk mengetahui keberhasilan dari sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja pada Dinas Pertanian dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan

program/kegiatan serta faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan kegiatan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian. kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisa tersebut meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / hambatan pencapaian target.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut:

1). Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indicator bahwa indicator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2). Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuanyang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4). Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Serta menguraikan mengenai hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 3.2

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Capaian
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	80,55%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: 17,35% Jagung: 14,63% Kedelai: (-0,85%)
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus	Padi: 4,78% Jagung: (-12,15% Kedelai: (-12,23%)

				persen	
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	96%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dibagi total kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan	66,05%

3.3 Analisis Hasil Capaian Kinerja (per sub kegiatan)

Sasaran 2.1 Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Dari sasaran meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan, dengan indikator persentase peningkatan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan menggunakan formula $\frac{\text{Produksi tahun 2024} - \text{produksi tahun 2023}}{\text{produksi tahun 2023}}$, kemudian selisih ini dibagi dengan produksi tahun 2023.

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produksi Tahun 2021 (ton)	Produksi Tahun 2022 (ton)	Produksi Tahun 2023 (ton)	Produksi Tahun 2024 (ton)	Persentase Peningkatan Produksi(%)
Padi	197.933	210.095	184.883	216.969	17,35%
Jagung	12.713	14.680	12.262	14.056	14,63%
Kedelai	395	639	1.828	270	(-0,85%)

Sumber: Data Diolah

Produksi padi tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2023. Begitu pula dengan komoditas unggulan lainnya jagung. Dimana jagung juga mengalami peningkatan produksi. Hal ini karena cuaca yang mendukung untuk pertanaman sehingga luas tanam meningkat, berpengaruh kepada produksi yang meningkat pula. Adanya bantuan benih, adanya bantuan pompa untuk mengairi saat musim kemarau serta adanya bantuan pupuk. Untuk komoditas kedelai, penanaman hanya dilakukan di Kecamatan Kediri seluas 5 Ha. Penanaman kedelai (edamame) di Baturiti dilakukan panen muda. Disamping itu tidak ada bantuan benih kedelai dan petani enggan menanam

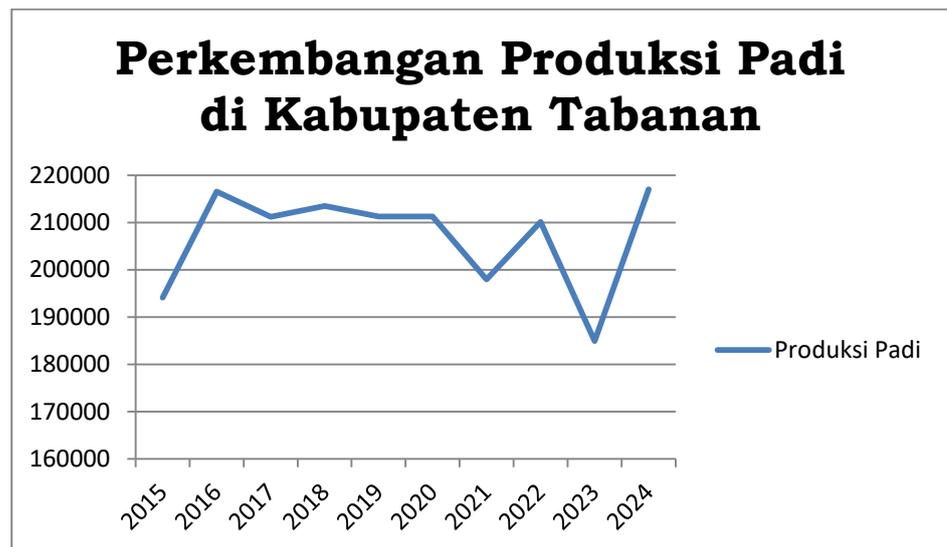
kedelai secara swadaya.

Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Komoditas Unggulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (ton)	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095	184.883	216.969
Jagung (ton)	5.035	7.369	8.691	8.901	8.691	1.440	12.713	14.680	12.262	14.056
Kedelai (ton)	679	1.280	1.107	2.411	1.896	153	395	639	1.828	270

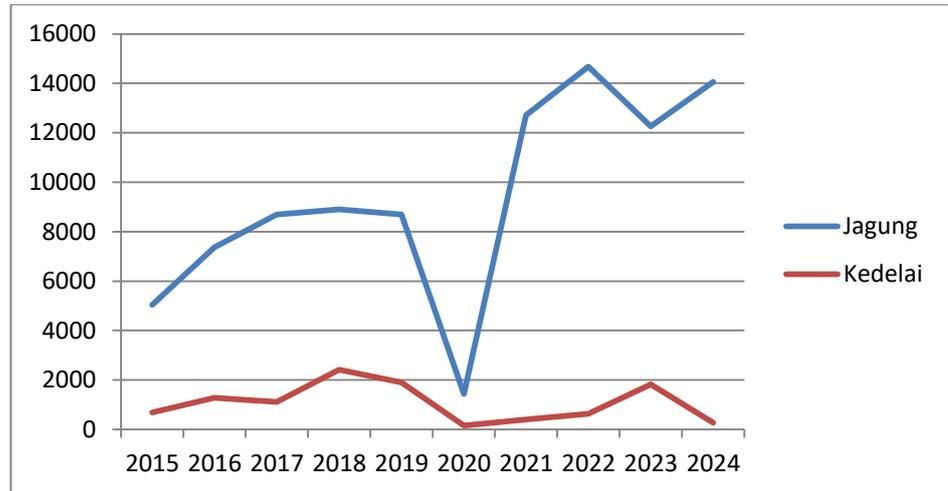
Secara umum produksi padi, jagung dan kedelai kalau dituangkan ke dalam grafik perkembangan produksi seperti grafik dibawah.

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Untuk produksi komoditas perkebunan sesuai dengan data pada tabel dibawah

3.4 Tabel Produksi Komoditas Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	Luas Areal Tanaman Menghasilkan (Ha)			Produksi (Ton)			Persentase Peningkatan Produksi
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	KELAPA HYBRIDA	2,00	7,00	3,50	0,30	1,39	1,20	-13,67
2	KELAPA GENJAH	342,63	647,30	647,30	251,36	258,51	435,37	68,42
3	KELAPA DALAM	12.911,50	15.038,42	15.038,42	15.165,29	15.126,78	15.735,89	4,03
4	KAKAO	3.342,97	4529,507	4.529,51	942,06	1.048,54	937,18	-10,62
5	KOPI ARABIKA	600,55	907,99	907,99	24,14	14,36	16,00	11,42
6	KOPI ROBUSTA	8.387,08	9.584,87	9.584,87	5.327,27	4.285,18	4.804,16	12,11
7	CENGKEH	1.854,81	2.365,87	2.365,87	145,05	202,65	348,79	72,11
8	PANILI	-	9,43	9,43	-	-	-	-
9	LADA	-	-	-	-	-	-	-
10	KEMIRI	20,74	20,74	20,74	11,04	11,54	11,80	2,25
11	PALA	38,56	101,07	101,07	8,80	8,89	17,40	95,73
12	AREN	110,11	186,04	186,04	9,45	9,63	10,15	5,40

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Secara umum produksi komoditas perkebunan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Hanya kelapa hibrida dan kakao yang mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk komoditas lain secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Terutama kelapa genjah sebanyak 68,42%, cengkeh sebanyak 72,11% dan pala sebanyak 95,73%.

Sasaran 2.1 Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dari sasaran peningkatan prasarana dan sarana pertanian dengan indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dimana didapat dari perhitungan produktivitas tahun berlaku di kurangi produktivitas tahun sebelumnya, dibagi dengan produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Dimana hasil perhitungan produktivitas tanaman pangan sesuai dengan table dibawah

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produktivitas Tahun 2023 (kw/ha)	Produktivitas Tahun 2024	Persentase Peningkatan Produktivita
Padi	57,08	59,81	4,78%
Jagung	73,56	64,62	(-12,15%)
Kedelai	20,11	17,65	(-12,23)

Sumber: Data Statistik Pertanian

Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2024 luas tanam padi mengalami peningkatan akibat adanya cuaca yang mendukung sehingga penanaman dapat dilaksanakan. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample

ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat.

Jagung mengalami penurunan produktivitas karena lokasi pengambilan ubinan yang mendukung, penggunaan pupuk berimbang, system perawatan yang intensif.

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Selain sebagai sumber protein nabati, kedelai merupakan sumber lemak, mineral, dan vitamin serta dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, dan susu. Untuk produktivitas komoditas kedelai, produktivitas mengalami penurunan karena tidak ada bantuan benih kedelai dan masyarakat enggan menanam secara swadaya.

Tabel 3.6
Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan

No	URAIAN	Tahun														
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	L. Tanam (Ha)	44.701	41.411	40.916	42.827	32.600	33.040	46.084	37.386	36.855	34.783	37.075	37.882	33.091	31.625	34.134
	L Panen Bersih	41.637	40.789	39.415	41.612	36.892	32.374	39.603	36.809	36.840	37.266	33.065	36.864	34.903	31.130	34.781
	Produktivitas	56,10	52,09	56, 49	56,16	58,07	59,96	56,10	57,37	58,04	55,81	64.24	53,75	57,81	57,08	59,96
	Produksi (Ton)	233.602	212.481	222.659	233.690	214.203	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095	184.882	216.976
2	Produksi Beras	102.235	107.629	112.665	118.251	111.394, 10	104.766	115.249	113.969	113.405	112.216	112.784	105,177	113.391	115.995	136,130
	Kebutuhan Beras (Ton)	60.450	61.978	63.052	63.271	56.322	49.700	49.700	50.281	50.281	50.281	50.817	51.421	51.000	44.757	44.757
	Surplus Beras	41.785	45.651	49.613	54.980	49.440	48.451	58.770	56.870	58.096	56.906	56.885	48.614	55.773	68.887	80.845

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Untuk persentase peningkatan produktivitas hasil perkebunan dengan menggunakan formula produktivitas tahun 2024 dikurangi produktivitas 2023, kemudian selisih ini dibagi dengan produktivitas tahun 2023.

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas
Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	PRODUKTIVITAS (KG/HA)				Persentase Peningkatan Produktivitas (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	KELAPA HYBRIDA	635	150	695	342,86	-50,67
2	KELAPA GENJAH	740	734	754	342,86	-54,53
3	KELAPA DALAM	1.19	1.17	1160	1.046,3	-9,79
4	KAKAO	274	282	283	206,91	-26,89
5	KOPI ARABIKA	27	40	51	17,62	-65,45
6	KOPI ROBUSTA	690	635	593	501,22	-15,48
7	CENGKEH	147	78	92	147,43	60,25
8	PANILI	0	0	0		0
9	LADA	0	0	0		0
10	KEMIRI	554	532	556	568,95	2,33
11	PALA	212	228	231	172,16	-25,47
12	AREN	92	86	897	54,56	-93,92

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Dari tabel dapat dilihat bahwa hampir semua produktivitas komoditas perkebunan mengalami penurunan dari tahun 2023. Hanya cengkeh dan kemiri yang mengalami peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan karena kualitas bibit yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk, iklim yang tidak mendukung di tahun 2024, dan adanya anomaly iklim. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman yang masih

rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Langkah-langkah pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao
- Pengawasan dan pendampingan
- Pengendalian OPT dan penerapan PHT
- Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
- Indikasi geografis
- Pemberdayaan petugas pengamat OPT
- Agroindustri komoditi kakao
- Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar
- Pembinaan usaha komoditi kakao
- Sistem jaminan mutu
- Melakukan promosi

Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024

Berdasarkan data, dapat diamati bahwa sepanjang tahun 2024, Dinas Pertanian mengalokasikan tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK dan NPK Formula Khusus sesuai dengan yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Dimana komoditas yang termasuk diantaranya Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

**Tabel 3.8 DATA REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 (PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2024)**

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (kg)								
		Urea			NPK			NPK Formula Khusus		
		Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Realisasi	% Real
1	Selemadeg Barat	302.800	156,95	51,83	214.340	92,60	43,20	1.117,54	162,40	14,53
2	Selemadeg	397.700	321,10	80,74	340.000	331,50	97,50	131,46	5,90	4,49
3	Selemadeg Timur	838.803	553,30	65,96	1.107.405	654,97	59,14	-	-	-
4	Kerambitan	1.262.950	756,56	59,90	858.370	763,86	88,99	-	-	-
5	Tabanan	1.330.379	793,77	59,66	1.364.917	799,82	58,60	-	-	-
6	Kediri	1.386.915	1.112,73	80,23	1.435.120	1.010,51	70,41	-	-	-
7	Marga	838.790	694,70	82,82	810.137	672,60	83,02	-	-	-
8	Baturiti	611.739	485,45	79,36	609.516	402,70	66,07	-	-	-
9	Penebel	1.264.257	1.240,45	98,12	1.180.919	1.121,95	95,01	-	-	-
10	Pupuan	265.667	167,78	63,15	1.204.276	885,30	73,51	-	-	-
	Jumlah :	8.500.000	6.282,78	73,92	9.125.000	6.735,81	73,82	1.249,00	168,30	19,02

Pembangunan prasarana yang dilakukan sepanjang tahun 2024 yakni sesuai tabel dibawah:

Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2024

No	Jenis Prasarana	Jumlah Pembangunan
1	Pembangunan Jalan Produksi	2 Paket
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	3 Paket
3	Rehab Pelengkap Irigasi	1 Paket
4	DAM Parit	1 Paket
5	Rabat Beton	1 Paket
6	Pengadaan Mesin Selip	2 Paket
7	Pengadaan alat Pertanian	1 Paket
8	Pengadaan Traktor	1 Paket

Sasaran 2.3 Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Dari sasaran Meningkatkan Produktivitas Peternakan dengan indikator persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Dalam hal pelayanan kesehatan hewan selain dilakukan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan, juga dilakukan pemberian obat-obatan untuk ternak sapi di kelompok ternak serta melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Munculnya penyakit kuku dan mulut pada bulan Juli 2022 sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan. Arahan dari menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan Satgas PMK bahwa sebelum pelaksanaan G20 tanggal 13 November 2022 pelaksanaan cakupan vaksinasi PMK sudah mencapai 80% pada hewan rentan PMK (sapi, kerbau, kambing dan babi).

Rabies adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis atau dalam kata lain bisa menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tak hanya menyerang anjing, tetapi mamalia berdarah panas juga memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit rabies ini. Rabies ini bisa menyerang hewan sejak lahir. Maka dari itu, perlu dilakukan vaksinasi rabies sejak dini demi mencegah terjangkitnya virus tersebut bagi para hewan peliharaan. Tingkat efektivitas vaksin rabies ini 100%, sehingga sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pencegahan rabies.

Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2024

KECAMATAN	POPULASI ANJING	HASIL VAKSINASI Rabies				Cakupan (%)
		ANJING	KUCING	MONYET	TOTAL VAKSINASI	
Baturiti	4.748	4.675	13	0	4.688	98,46
Kediri	5.697	6.697	59	1	6.757	117,55
Kerambitan	4.739	5.490	32	0	5.522	115,85
Marga	7.779	4.284	0	0	4.284	55,07
Penebel	6.365	6.017	4	0	6.021	94,53
Pupuan	6.124	2.435	149	0	2.584	39,76
Selemadeg	3.966	1.926	106	0	2.032	48,56
Selemadeg Barat	3.696	1.995	172	1	2.168	53,98
Selemadeg Timur	5.245	2.207	181	0	2.388	42,08
Tabanan	6.367	5.932	98	0	6.030	93,17

TOTAL	54.726	41.658	814	2	42.474	76,12
--------------	---------------	---------------	------------	----------	---------------	--------------

Sumber: Statistik Peternakan

Tabel 3.11 Hasil Vaksinasi Sapi

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi				Total Vaksinasi
				I	II	III	IV	
1	Tabanan	Baturiti	12.325	341	779	5.677	569	7.366
2		Kediri	2.485	268	265	242	1.302	1.893
3		Kerambitan	2.047	1.146	178	952	508	2.784
4		Marga	4.794	185	117	715	567	1.584
5		Penebel	6.821	142	91	3.763	0	3.996
6		Pupuan	307	0	0	0	0	
7		Selemadeg	3.174	283	581	1.066	0	1.930
8		Selemadeg Barat	2.647	228	1.320	271	0	1.819
9		Selemadeg Timur	4.483	436	569	1.584	0	2.589
10		Tabanan	2.209	162	318	122	562	1.164
		TOTAL	41.292	3.191	4.218	14.392	3.508	25.309

Tabel 3.12 Hasil Vaksinasi Babi

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi				Total Vaksinasi
				I	II	III	IV	
1	Tabanan	Baturiti	9.528	0	0	0	0	
2		Kediri	580	0	0	0	0	
3		Kerambitan	473	0	0	0	0	
4		Marga	2.331	0	0	0	0	
5		Penebel	5.770	0	0	0	0	
6		Pupuan	653	0	0	0	0	
7		Selemadeg	3.521	250	0	0	0	250
8		Selemadeg Barat	1.702	0	0	0	0	
9		Selemadeg Timur	3.236	480	0	0	0	480
10		Tabanan	8.948	0	0	0	0	

		TOTAL	36.742	730	0	0	0	730
--	--	--------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------------

Tabel 3.13 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2024 Kabupaten Tabanan

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2023 ekor	2024 ekor	
1	Sapi	38.988	38.990	0,01
2	Kerbau	71	120	69,01
3	Kuda	9	8	(-11,11)
4	Babi	31.903	30.921	(-3,08)
5	Kambing	2.049	3.105	51,54
6	Ayam Buras	242.464	250.148	3,17
7	Ayam Ras Petelur	1.233.300	1.326.620	7,57
8	Ayam Ras Pedaging	1.859.900	1.809.400	(-2,72)
9	Itik	46.734	63.006	34,82

Sumber: Statistik Peternakan

Beberapa alasan peningkatan dan penurunan populasi ternak antara lain:

1. Ternak Sapi meningkat karena:

- Meningkatnya minat petani peternak untuk memelihara ternak sapi
- Ketersediaan pakan dan hijauan banyak tersedia dan adanya bantuan pemerintah untuk membantu petani dan kelompok ternak dalam hal pengadaan bibit sapi.
- Adanya terobosan pemerintah dalam perlindungan petani melalui program asuransi yang disubsidi oleh pemerintah sehingga petani ternak bisa terlindungi dari kerugian beternak
- Pelayanan kesehatan hewan terutama vaksinasi PMK sudah

- dilaksanakan secara rutin.
2. Ternak Kerbau meningkat karena ketersediaan pakan dan hijauan banyak tersedia
 3. Ternak Kuda menurun karena kurangnya minat petani untuk memelihara kuda
 4. Ternak Babi turun karena masih rentannya penyakit pada babi dimana banyak perusahaan dan peternak babi belum berani memelihara babi dalam jumlah besar.
 5. Ternak Kambing meningkat karena masyarakat semakin minat memelihara kambing dan adanya bantuan bibit ternak kambing
 6. Ternak Ayam Buras meningkat karena meningkatnya pemeliharaan ayam buras dan vaksinasi ND sudah dilaksanakan secara rutin
 7. Ternak Ayam Petelur naik karena disebabkan harga telur yang meningkat mahal sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak serta adanya beberapa peternak yang mengalami peningkatan volume pemeliharaan yang menunjang pendapatan sehari-hari
 8. Ternak Ayam Pedaging Turun karena tidak stabilnya harga pakan dengan harga ayam hidup sehingga fluktuasi harga terlalu cepat sehingga peternak mengurangi volume pemeliharaan serta masih adanya pasokan daging dari perusahaan di luar Bali sehingga berpengaruh terhadap harga ayam di Bali
 9. Ternak itik meningkat karena meningkatnya minat masyarakat untuk memelihara itik

Secara umum faktor yang dirasa menghambat pengembangan peternakan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga

perlu ditertibkan lagi.

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Upaya yang ditempuh antara lain:

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.
2. Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi secara terus-menerus baik melalui jalur formal maupun informal.
4. Pemotongan babi diluar RPH belum mempunyai penampungan limbah, disarankan untuk melakukan pemotongan di RPH sesuai dengan Perbub. Nomor 67 Tahun 2013.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dinas Pertanian melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan. Pemeriksaan ini mengeluarkan sertifikat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Tahun 2024 jumlah SKKH yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel

Tabel 3.14 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan

NO	TAHUN	JUMLAH SKKH	JUMLAH BAP	KETERANGAN
1	Tahun 2024	992	143	Komoditas Sapi, Kambing, DOC, DOD, Ayam Afkir, Ayam petelur, Babi
2	Tahun 2023	659	0	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan. Untuk tahun 2024, hanya mengeluarkan SKKH saja
3	Jumlah 2022	8	268	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
4	Jumlah 2021	0	263	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
5	Jumlah 2020	71 6	11 0	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku, Daging olahan

Diharapkan dengan pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan derajat hewan di Kabupaten Tabanan.

Sasaran 2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani.

Tahun 2024 penyuluh membina kelompok tani, subak dan subak abian sebanyak 1.738 kelompok. Di akhir tahun 2024 berdasarkan data akhir tahun 2024 jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang ada sebanyak 2.626 kelompok. Sehingga persentase capaian jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang terbina tahun 2024 sebanyak 66,05%

Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa.

Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya program Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten mewakili ke untuk tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

Permasalahan yang ada di bidang penyuluhan adalah jumlah tenaga Penyuluh Pertanian yang ada di Kabupaten baik tenaga Penyuluh PNS, PPPK dan Penyuluh Pertanian Swadaya belum mencukupi seperti yang diharapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 Tanggal : 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Penyuluhan Pertanian. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang mengusahakan komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kondisi ini tentu akan terus berlanjut mengingat makin banyak tenaga penyuluh PNS yang sudah mencapai usia pensiun, sementara pengangkatan tenaga penyuluh setiap tahunnya hampir tidak ada. Untuk melaksanakan fungsi dan peran penyuluh, menuntut adanya peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian untuk mewujudkan Penyuluh Pertanian yang profesional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, diperlukan standar

kompetensi yang mencerminkan profesionalismenya seorang Penyuluh Pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian. Namun dari semua penyuluh yang ada baru beberapa orang saja yang telah memiliki sertifikat standar kompetensi melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan 39 Pertanian, namun dari semua sertifikat yang dimiliki semua sudah habis masa berlakunya dan perlu uji kompetensi kembali. Berkaitan dengan ketengaan penyuluhan dijumpai beberapa permasalahan yaitu:

1. Wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) sangat luas (lebih dari 1 desa, bahkan 1 penyuluh mewilayahi 5 desa) sehingga tidak bisa melakukan penyuluhan secara optimal;
2. Minimnya formasi peningkatan kompetensi penyuluh, seperti latihan dasar, sertifikasi dan uji kompetensi penyuluh;
3. Kurangnya program pelatihan bagi penyuluh swadaya, dalam upaya peningkatan kapasitas penyuluh swadaya

3.4 Telaah Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023

Produksi tanaman pangan strategis Tahun 2023 terdiri dari produksi padi dan jagung yang produksinya turun sebesar 5,08%. Hal ini menjadikan total produksi tanaman pangan strategis tahun 2023 sebesar 73,19 juta ton, lebih rendah dari produksi tahun 2022 sebesar 77,12 juta ton. Capaian produksi beras tahun 2023 sebesar 30,96 juta ton beras, apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (RPJMN) Tahun 2023 (45,4 juta ton beras), terealisasi 68,19%, sedangkan terhadap target 2024 (46,8 juta ton beras) tercapai 66,15%. Berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil Susenas Maret 2021 dan proyeksi penduduk 2021 (Supas 2015), konsumsi beras nasional tahun 2023 adalah 30,62

juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 342,38 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan produksi beras masih bisa mencukupi konsumsi penduduk nasional. Kegiatan utama yang mendukung produksi padi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Kawasan Padi

Kegiatan kawasan padi Tahun 2023 mencakup 11 kegiatan, yang terdiri dari kegiatan padi biofortifikasi (Gambar 6), Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) Padi, Padi Lahan Kering, Demplot Padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jajar Legowo), Padi Rawa, Padi Ramah Lingkungan, Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Padi, Budidaya Padi Bioremediasi, Pengembangan Budidaya Padi Intensif Hara Berimbang, Budidaya Biopresisi (Akurasi Berimbang), dan Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Padi. Target kegiatan kawasan padi adalah 414.400 ha dengan pagu Rp 665.644.755.000,- Realisasi fisik kegiatan utama padi sampai Desember seluas 418.411 ha (100,99%) terhadap sasaran, dan realisasi keuangan mencapai Rp644.290.118.165,- atau (96,79%).

- Produksi tanaman pangan strategis Tahun 2023 terdiri dari produksi padi dan jagung yang produksinya turun sebesar 5,08%. Hal ini menjadikan total produksi tanaman pangan strategis tahun 2023 sebesar 73,19 juta ton, lebih rendah dari produksi tahun 2022 sebesar 77,12 juta ton. Produksi komoditas tanaman pangan.
- Adanya pergantian varietas benih bermutu yang digunakan oleh petani. Petani sebelumnya secara umum menggunakan varietas Ciherang dan IR 64, namun saat ini lebih banyak menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari 32 dan Inpari 30.
- Produksi jagung pada tahun 2023 (dengan kadar air 27%) mencapai 19,56 juta ton yang dihitung berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2023 mengalami penurunan 2,79 juta ton atau 12,5% terhadap produksi jagung 2022.

- Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2023 adalah sebesar 0,73%. Hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2023 sebesar 5.069.784,62 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2022 sebesar 5.033.204,64 ton. Komoditas hortikultura strategis meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih.
- Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan single data sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) penguatan penyuluh berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota.

3.5 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lain (Badung) Tahun 2023

Kabupaten Badung berkontribusi terhadap prosentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri sebesar 0,32% atau sebanyak 139.262 Ton dari capaian Nasional yakni 42.699.681 Ton. Peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri di Tahun 2023 diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melaksanakan berbagai strategi seperti penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, menyusun neraca pangan strategis dan serta pemeliharaan jaringan irigasi. Target presentase (%)

peningkatan produksi pangan strategis Tahun 2023 adalah 0,15% dan terealisasi sebesar 0,13 % dengan presentase 86,6%. Produksi kumulatif pangan strategis Tahun 2023 adalah sebesar 132.745 Ton. Terjadi penurunan terhadap produksi pangan strategis khususnya produksi daging dan telur. Terlihat pada diagram diatas bahwa pada Tahun 2022 total produksi daging adalah sebanyak 52.459 Ton dan produksi telur di Kabupaten Badung mencapai 2.842 Ton sedangkan terjadi penurunan jumlah produksi daging di Tahun 2023 menjadi 49.654 Ton dan produksi telur menurun menjadi 2.702 Ton.

Penurunan Produksi Pangan Strategis di Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terjadinya El nino yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023.
2. Terjadinya bencana alam jebolnya terowongan irigasi yang berdampak terhadap 260 hektar lahan sawah mengalami gagal panen.
3. Maraknya alih fungsi lahan persawahan menjadi non persawahan seperti perumahan, vila, hotel dan restoran.
4. Perbaikan jaringan irigasi yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
5. Menurunnya kualitas dan debit air
6. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman
7. Terjadinya kasus penyakit Meningitis Streptococcus Suis yang bersifat menular kepada manusia (zoonosis) sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi daging babi
8. Meningkatnya permintaan babi potong dari luar daerah dengan harga yang lebih mahal sehingga menurunnya jumlah pemotongan babi untuk konsumsi lokal

9. Menurunnya produksi telur disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku pakan terutama jagung sehingga terjadi penurunan populasi ayam petelur

3.6 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2023

Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (%) Produktivitas Padi pada tahun 2023 dan 2022 untuk Provinsi Bali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 - 2021, hal ini disebabkan oleh meningkatnya luas panen dari tahun 2022 seluas 112.321 Ha dan pada tahun 2023 seluas 123.707 Ha dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Padi tahun 2022 dan tahun 2023 dengan jumlah 680.602 ton pada tahun 2022 dan 749.990 ton tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, produktivitas pada tahun 2023, 6.59 ton/Ha dan 6.63 ton/ha pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh peningkatan luas panen padi dan inovasi teknologi budidaya pertanian dan penggunaan benih bersertifikat.

Pada Produktivitas komoditas Jagung mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2023 sebesar 4.25 ton/Ha dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.32 Ku/Ha, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan luas panen pada tahun 2022 seluas 15.734 Ha sedangkan pada tahun 2023 seluas 13.476 Ha, serta anomali iklim dan serangan OPT yang menyebabkan panen jagung tidak optimal.

Pada produktivitas komoditas Kedelai mengalami peningkatan produktivitas pada tahun 2023 sebesar 1.65 ton/Ha, dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.57 ton/Ha, hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen yang mana tahun 2023 seluas 2.761 Ha sedangkan pada tahun 2022 seluas 2.076

Ha selain bertambahnya luas panen, penggunaan benih yang bersertifikat yang toleran terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2023 produktivitas komoditas perkebunan mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan tahun 2022 sebesar - 1,58% , yang mana produktivitas tahun 2023 sebesar 751 Kg/Ha/Thn, dibandingkan tahun 2022 sebesar 750 Kg/Ha/Thn, hal ini disebabkan oleh terjadinya anomali iklim sepanjang tahun 2023 sehingga mempengaruhi produksi beberapa komoditas penting selain itu faktor lainnya adalah usia tanaman yang lebih dari 20 tahun dan serangan OPT.

Capaian produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2022 yang hanya - 1,58%, hal ini di sebabkan pada tahun 2023 luas tanam komoditi kelapa dan kopi arabika dan robusta mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun 2022 sedangkan produksi pada tahun 2023 pada komoditi kopi robusta, cengkeh dan kelapa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 hal ini berkorelasi terhadap peningkatan produktivitas, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas tahun 2022 adalah adanya fenomena la nina yakni terjadinya musim hujan hampir sepanjang tahun, sehingga mengganggu proses terbentuknya bunga atau proses generative serta meningkatnya serangan OPT utama (oragnisme pengganggu tumbuhan) seperti PBK, PBKo, busuk buah kakao, helopeltis dan serangan jamur akar putih (JAP).

Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%). Populasi Ternak Bali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 926.754 Satuan Ternak (ST), dibandingkan tahun 2022 sebesar 892.938 Satuan Ternak (ST) atau 3,79% disebabkan oleh berhasilnya cakupan vaksninasi PMK yang dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 Provinsi Bali bebas dari

penyakit kuku dan mulut (PMK) dan meningkatkan populasi ternak

3.15 Capaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2024

Tabel Capaian Program dan Kegiatan Sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase Capaian
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.238.594.500	20.329.952.271	4.908.642.229	80,55
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.984.500	1.015.500	79,69
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.360.250	639.750	78,68
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.624.250	375.750	81,21
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.493.741.000	18.892.332.652	4.601.408.348	80,41
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.491.241.000	18.890.121.002	4.601.119.998	80,41
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000	2.211.650	288.350	88,47
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.630.000	117.178.704	46.451.296	71,61
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	1.969.000	1.031.000	65,63
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.990.700	1.072.500	1.918.200	35,86
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.779.000	47.777.730	26.001.270	64,76
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.500	3.189.750	1.809.750	63,80
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	55.217.400	46.971.600	8.245.800	85,07
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.672.000	12.498.124	1.173.876	91,41
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.971.400	3.700.000	6.271.400	37,11
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.474.400	51.115.000	359.400	99,30
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp51.474.400,00	Rp51.115.000,00	359.400	99,30

3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.378.791.900	1.152.859.465	225.932.435	83,61
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.496.500	8.740.000	756.500	92,03
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.858.900	155.764.257	60.094.643	72,16
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.153.436.500	988.355.208	165.081.292	85,69
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.957.200	112.481.950	33.475.250	77,07
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.995.000	70.886.950	21.108.050	77,06
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.962.200	41.595.000	12.367.200	77,08
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp3.880.297.500,00	Rp3.775.114.089,20	105.183.411	97,29
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.764.364.500	Rp1.693.676.039,20	70.688.461	95,99
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.555.751.500	1.500.305.348	55.446.152	96,44
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	208.613.000	193.370.691	15.242.309	92,69
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	167.793.000	145.375.400	22.417.600	86,64
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	119.443.000	98.856.250	20.586.750	82,76
3.27.02.2.02.0034	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	48.350.000	46.519.150	1.830.850	96,21
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.948.140.000	Rp1.936.062.650,00	12.077.350	99,38
3.27.02.2.06.0004	Penyediaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.948.140.000	Rp1.936.062.650,00	12.077.350	99,38
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp3.102.190.436,00	Rp2.910.761.222,70	191.429.213	93,83
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	292.800.000	271.529.050	21.270.950	92,74
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	292.800.000	271.529.050	21.270.950	92,74
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana	2.809.390.436	2.639.232.172	170.158.264	93,94

	Pertanian				
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.491.645.000	1.474.819.756	16.825.244	98,87
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.317.745.436	1.164.412.416	153.333.020	88,36
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp631.808.000,00	Rp444.929.736,00	186.878.264	70,42
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	631.808.000	444.929.736	186.878.264	70,42
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	600.325.000	418.251.786	182.073.214	69,67
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	31.483.000	26.677.950	4.805.050	84,74
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	31.483.000	26.677.950	4.805.050	84,74
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp896.600.000,00	Rp816.391.755,00	80.208.245	91,05
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp896.600.000,00	Rp816.391.755,00	80.208.245	91,05
3.27.07.2.01.0001	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	156.600.000	138.165.150	18.434.850	88,23
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	515.000.000	469.895.480	45.104.520	91,24
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	225.000.000	208.331.125	16.668.875	92,59

Realisasi anggaran tahun 2024 dari segi keuangan rata-rata sudah mendekati 100%. Beberapa sub kegiatan seperti Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dibawah 50% karena memang tidak bisa diampriah. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang belum tercapai 100%, hal ini karena memang dianggarkan untuk operasional pengobatan penyakit PMK. Selanjutnya tidak terrealisasi karena tidak ada kejadian kasus PMK selama tahun 2024.

3.8 Prestasi Tahun 2024

Prestasi (tingkat Provinsi atau tingkat Nasional) yang diraih oleh (OPD) pada Tahun 2024 antara lain :

- a. Mendapatkan juara 1 atas nama Ni Kadek Diah Pradnyani S.P., M.Si dalam rangka penyuluh pertanian berprestasi.
- b. Mendapatkan juara 2 atas nama I Wayan Agung Hardita, S.P dalam rangka penyuluh pertanian berprestasi
- c. Mendapatkan juara 3 atas nama Gusti Ayu Putu Juliani, S.Pt dalam rangka penyuluh pertanian berprestasi
- d. Mendapatkan juara 1 atas nama BPP Kecamatan Kerambitan dalam rangka balai penyuluhan pertanian berprestasi
- e. Mendapatkan juara 2 atas nama BPP Kecamatan Baturiti dalam rangka balai penyuluhan pertanian berprestasi
- f. Mendapatkan juara 3 atas nama BPP Kecamatan Penebel dalam rangka balai penyuluhan pertanian berprestasi
- g. Mendapatkan juara 1 atas nama Gapoktan Subak Jatiluwih dalam rangka Gabungan Kelompok Tani Berprestasi
- h. Mendapatkan juara 2 atas nama Gapoktan Muda Mandiri dalam rangka Gabungan Kelompok Tani Berprestasi
- i. Mendapatkan juara 3 atas nama Gapoktan Giri Makar dalam rangka Gabungan Kelompok Tani Berprestasi
- j. Mendapatkan juara 1 atas nama I Made Siladana, S.E, M.Par dalam rangka Petani Berprestasi
- k. Mendapatkan juara 2 atas nama Kadek Ayu Ratna Fanisa, SM dalam rangka Petani Berprestasi
- l. Mendapatkan juara 3 atas nama I Wayan Suidiana dalam rangka Petani Berprestasi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyajikan keberhasilan dan kegagalan yang di tahun 2024. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- b. Hasil kinerja program yang tercermin dalam IKU, secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun ada juga sasaran yang tidak dapat tercapai namun tetap mengalami peningkatan.
- c. Hasil kinerja keuangan, capaian sasaran secara umum telah mampu mendekati seratus persen. Sisanya tidak diamprah karena efisiensi.

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja diatas, maka ada beberapa saran-saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Perlu ditingkatkan kompetensi aparat (kualitas SDM) Dinas Pertanian untuk mencapai prioritas sasaran berdasarkan Renstra.
2. Perlu selalu ditingkatkan sinkronisasi koordinasi dan kerja sama baik level horizontal maupun vertikal.
3. Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana untuk kelancaran administrasi dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
4. Kebijakan yang dapat diambil antara lain:

- Meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan pertanian,
- Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur pertanian.
- Penguatan petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT).
- Meningkatkan promosi dan pengembangan kualitas komoditas pertanian.
- Menyediakan benih unggul bermutu bagi petani pelaku usaha perkebunan.
- Menentukan kawasan agrobisnis peternakan yang potensial untuk dikembangkan.
- Sosialisasi bahaya penyakit hewan menular dan zoonosis.
- Peningkatan jumlah petugas respon cepat tentang penanggulangan penyakit zoonosis

Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan untuk tahun berikutnya.



**BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/310/03/HK/2025**

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024**

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

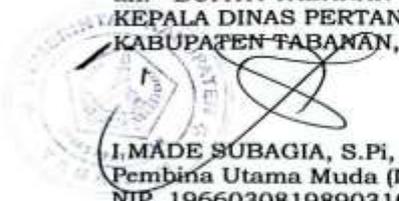
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2024 kepada Bupati Tabanan sebagai laporan kinerja sebagaimana yang jelas ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025.
- KETIGA** : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor Rekening 3.27.01.2.01.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 2 Januari 2025

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,



J. MADE SUBAGIA, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran 2. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			
					2021		2022		2024		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
		URUSAN PERTANIAN				40,262,336,447		38,596,687,073		36,524,429,820		37,855,866,776		38,985,364,948		40,148,814,173
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	35,932,259,947	100%	31,164,187,223	100%	31,086,876,688	100%	31,582,941,270	100%	32,252,939,517	100%	33,101,336,416
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	7,000,000	100%	8,000,000	100%	9,000,000	100%	10,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja		2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	4,500,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,500,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKJIP		1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,500,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	33,471,659,862	100%	29,005,211,423	100%	28,954,004,008	100%	29,030,645,179	100%	29,532,031,849	100%	30,384,817,721
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	33,444,270,786	100%	28,977,711,423	100%	28,925,129,008	100%	29,000,326,429	100%	29,500,197,161	100%	30,351,391,299

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	22,050,000	100%	23,152,500	100%	24,310,125
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Indikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	7,389,076	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	7,875,000	2 dokumen	8,268,750	2 dokumen	8,682,188	2 dokumen	9,116,297
Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	192,119,010	100%	227,152,200	100%	302,562,460	100%	324,707,593	100%	341,927,488	100%	359,023,863
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5,000,000	100%	2,223,000		2,334,150		2,450,858		2,573,400		2,702,070
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	6,000,000	100%	4,444,700	100%	4,666,935	100%	4,900,282	100%	5,145,296	100%	5,402,561
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	61,626,500	100%	50,000,000	100%	55,950,000	100%	58,747,500	100%	61,684,875	100%	64,769,119
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,428,000	100%	8,425,000	100%	11,849,900	100%	12,442,395	100%	13,064,515	100%	13,717,740
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	2,160,000	100%	1,980,000	100%	3,300,000	100%	3,465,000	100%	3,638,250	100%	3,820,163

	Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	50,439,51 0	100%	110,439,50 0	100%	115,961,475	100%	121,759,549	100%	127,847,526	100%	134,239,902
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	58,465,00 0	100%	39,640,000	100%	98,000,000	100%	102,900,000	100%	108,045,000	100%	113,447,250
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Terpeliharanya arsip pada SKPD	0	0	100%	10,000,000	100%	10,500,000	100%	18,042,010	100%	19,928,626	100%	20,925,057
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	1,546,524,400	100%	1,547,503,900	100%	1,624,879,095	100%	1,706,123,050	100%	1,791,598,786	100%	1,881,178,725
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8,625,000	100%	8,625,000	100%	9,056,250	100%	9,509,063	100%	10,154,099	100%	10,661,804
	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286,495,000	100%	286,499,500	100%	300,824,475	100%	315,865,699	100%	331,658,984	100%	348,241,933

				100%	1,251,404,400	100%	1,252,379,400	100%	1,314,998,370	100%	1,380,748,289	100%	1,449,785,703	100%	1,522,274,988
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	141,251,500	100%	140,941,200	100%	147,988,260	100%	255,965,448	100%	253,270,943	100%	309,635,200
			Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	106,661,500	100%	106,651,200	100%	111,983,760	100%	117,582,948	100%	123,462,095	100%	129,635,200
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	34,590,000	100%	34,290,000	100%	36,004,500	100%	138,382,500	100%	129,808,848	100%	180,000,000
Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		10%	716,826,500	10%	1,690,632,950	10%	804,340,902	10%	1,291,268,759	10%	1,406,887,381	10%	1,573,668,180
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	50%	463,076,500	50%	228,132,950	55%	659,601,527	60%	1,151,295,690	65%	1,269,008,069	70%	1,444,474,631

**perkebunan
dan
Pternakan**

	Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Sarana Pertanian		0		123,500,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	463,076,500	10 Kec	104,632,950	10 Kec	559,601,527	10 Kec	951,295,690	10 Kec	1,069,008,069	10 Kec	1,244,474,631
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme		1 jenis	103,750,000	2 jenis	95,000,000	3 jenis	114,384,375	4 jenis	120,103,594	5 jenis	126,108,773	6 jenis	126,108,773
Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	Perjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0	0	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	103,750,000	4 jenis tanaman	0	4 jenis tanaman	114,384,375	4 jenis tanaman	120,103,594	4 jenis tanaman	126,108,773	4 jenis tanaman	126,108,773
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	3,084,776

				Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	3,084,776
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan			10%	3,062,500,000	10%	4,780,491,900	10%	4,225,024,730	10%	4,398,775,472	10%	4,726,238,737	10%	4,857,525,899
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	50%	200,000,000	52%	1,315,116,900	54%	402,003,400	56%	499,178,893	58%	484,796,993	60%	507,929,320
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B	Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0	3 dokumen	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0	1 dokumen	47,500,000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Indikator: Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	1,220,116,900	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	441,845,165	1 dokumen	424,596,579	1 dokumen	444,718,885

			1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	47,500,000	1 Tahun	52,003,400	1 Tahun	57,333,728	1 Tahun	60,200,414	1 Tahun	63,210,435
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Indikator: Tersedianya Data Statistik Pertanian												
	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		57 unit	2,862,500,000	77 unit	3,465,375,000	97 unit	3,823,021,330	117 unit	3,899,596,579	137 unit	4,241,441,744	157 unit	4,349,596,579
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: tersedianya Prasarana Pertanian	7 unit	837,500,000	32 unit	2,795,375,000	49 unit	1,798,021,330	67 unit	1,724,596,579	82 unit	1,916,441,744	100 unit	1,724,596,579
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Tersedianya Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	1 unit	175,000,000	4 unit	0	5 unit	175,000,000	6 unit	175,000,000	7 unit	175,000,000	8 unit	175,000,000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terchabilitasnya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	40 unit	1,000,000,000	47 unit	370,000,000	52 unit	1,000,000,000	58 unit	1,150,000,000	65 unit	1,300,000,000	72 unit	1,600,000,000

Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan Indikator: Persentase pelayanan kehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kehatan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kehatan masyarakat veteriner		95%	223,250,000	96%	470,000,000	97%	236,250,000	98%	238,612,525	99%	250,543,125	100%	263,070,282
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	6000 ekor	188,250,000	8000 ekor	470,000,000	11000 ekor	236,250,000	14000 ekor	198,095,650	17000 ekor	208,000,406	21000 ekor	218,400,427
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	188,250,000	10 Kecamatan	470,000,000	10 Kecamatan	236,250,000	10 Kecamatan	198,095,650	10 Kecamatan	208,000,406	10 Kecamatan	218,400,427
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	100 dokumen	35,000,000	110 dokumen	0	120 dokumen	0	130 dokumen	40,516,875	140 dokumen	42,542,719	150 dokumen	44,669,855
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100 dokumen	35,000,000	110 dokumen	0	120 dokumen	0	130 dokumen	40,516,875	140 dokumen	42,542,719	150 dokumen	44,669,855
Tujuan 2: Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Indikator: Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh		40%	163,750,000	45%	491,375,000	50%	171,937,500	55%	172,134,375	60%	174,378,094	65%	176,606,698
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	25%	163,750,000	27%	491,375,000	30%	171,937,500	34%	172,134,375	39%	174,378,094	45%	176,606,698
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	163,750,000	144 Buku	277,625,000	144 Buku	171,937,500	144 Buku	172,134,375	144 Buku	174,378,094	144 Buku	176,606,698

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten			213,750,00 0								
--	--	--	--	---	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

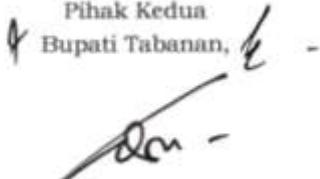
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil evaluasi inspektorat	90%
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi inspektorat	79%
3.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	Nilai Produktivitas Komoditas Pertanian	10%
4.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%
5.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan jumlah Unit Usaha yang tersertifikasi NKV	97%
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh dan petani yang Berprestasi	50%

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi Tahun ke-n dikurangi produksi tahun (n-1) dibagi produksi tahun (n-1) dikalikan seratus persen	10%	2.718.297.500
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan	Produktivitas Tahun ke-n dikurangi produktivitas tahun (n-1) dibagi produktivitas tahun (n-1) dikalikan seratus persen	10%	3.070.190.436

3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner/	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah Ternak dikalikan Seratus Persen	98%	617.725.000
4.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian yang Dibina oleh Penyuluh dibagi Total Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian dikalikan Seratus Persen	55%	898.600.000
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Distan Tabanan)	Jumlah Realisasi Anggaran Dibagi Jumlah Pagu Anggaran Dikalikan Seratus Persen	100%	25.284.889.600

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 29 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,


I Made Subagia, S.PI.,M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Prioritas Pangan Sandang dan Papan, Pasca Panen Produk Pertanian dalam Arti Luas yang Bermilai Ekonomi Tinggi	"SI YANTI RUPAWAN" (Digitalisasi Pelayanan Retribusi Rumah Potong Hewan Tabanan Era Baru AUM)	Aplikasi pembayaran retribusi rumah potong hewan, yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mempermudah pembayaran retribusi rumah potong hewan melalui pembayaran digital	Jumlah Jagal Yang Menggunakan Aplikasi di Bagi Jumlah Jagal Yang Ada	100%	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	96	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	

3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi / penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	

III	PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS <i>(Lampiran ini khusus dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah Terkait sesuai Kategori)</i>				
B	Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah kebijakan Daerah				
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Dinas Pertanian	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati / DPRD tentang Program Pembentukan Perbup / Perda	1 Perda	

C Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
1	Dinas Pertanian	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan	Realisasi capaian PAD dibagi dengan target dikali 100%	100%	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 29 Januari 2024

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,


I Made Sabagta, S.Pi., M.M.